

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menjalankan unit usahanya diantaranya usaha simpan pinjam dan bentuk kegiatan usaha lainnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Koperasi tidak terlepas dari pelaporan dan pembukuan. Pengurus harus memperhatikan dan mengelola dengan baik semua pelaporan khususnya pelaporan keuangan. Laporan keuangan sangat dibutuhkan untuk perencanaan, pertimbangan, pengawasan dan evaluasi kegiatan yang akan dan harus diperbaiki dimasa mendatang.

Sistem perekonomian Indonesia sesuai UUD 1945 mengenal tiga pelaku utama yaitu pemerintah, swasta, dan koperasi. Ketiga pelaku ekonomi ini diharapkan dan seharusnya memiliki peranan dan perlakuan yang sama dalam perekonomian. Setiap perusahaan perlu mengadakan kegiatan laporan keuangan menilai kondisi dan kinerja dari perusahaan tersebut. Begitu halnya dengan Koperasi atau lembaga sejenis koperasi yang perlu melakukan kegiatan tersebut dalam menilai tingkat kesejahteraan atau kemajuan dari koperasi tersebut.

Laporan keuangan adalah hasil akhir proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya

sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan. Di samping sebagai informasi bagi para pemakai laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas Akuntabilitas. Mereka yang memiliki kepentingan terhadap perkembangan suatu perusahaan sangatlah penting untuk mengetahui kondisi laporan keuangan tersebut

Penyusunan laporan keuangan wajib dilakukan sebagai salah satu laporan pertanggungjawaban tahunan koperasi yang disampaikan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pemakaian utama dari laporan keuangan koperasi adalah para anggota koperasi itu sendiri beserta pejabat koperasi. Pemakai lainnya yang mempunyai kepentingan terhadap koperasi adalah calon anggota koperasi, Standar pelaporan keuangan dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas dari sebuah unit bisnis dan agar laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Jika laporan keuangan tidak berisikan informasi yang benar dan wajar maka akan menyesatkan pembacanya dalam membuat keputusan ekonominya.

Akuntabilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan aktivitas, sehingga akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban. Suatu organisasi dikatakan akuntabel jika memiliki kemampuan untuk menjelaskan kondisi yang dialami termasuk didalamnya keputusan yang diambil dan berbagai aktivitas yang dilakukan. Serta pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggung jawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh pengurus koperasi.

Sebagai suatu entitas ekonomi, koperasi diharapkan dapat terus berkembang dan para pengurusnya dapat lebih bersikap profesional. Hal ini dapat dinyatakan dalam bentuk penyajian secara wajar atas informasi keuangan, yang kemudian akan bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam mengambil keputusan. Pernyataan Standar akuntansi keuangan Nomor 27 (PSAK 27) tentang Akuntansi Koperasi mewajibkan pengurus koperasi untuk melaporkan segala sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi, termasuk didalamnya aspek keuangan pada rapat anggota. Dalam hal ini, pengurus koperasi wajib membuat laporan keuangan sebagai bagian laporan akuntabilitas atau pertanggung jawaban pengurus.

Untuk melaksanakan analisis akuntabilitas koperasi maka perlu penyempurnaan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 43/KEP/KUKM/VII/2004 tentang Pedoman Penerapan Akuntabilitas Koperasi dan menganalisis apakah laporan keuangan koperasi sudah sesuai dengan SAK ETAP dalam rangka meningkatkan akuntabilitas koperasi manajemen yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, koperasi harus meningkatkan kepercayaan kepada anggota dan masyarakat. Untuk itu perlu menganalisis akuntabilitas laporan keuangan koperasi sehingga dapat menghasilkan tata kelola manajemen yang baik. Dari uraian di atas peneliti ingin mengambil topik penelitian yaitu **“Analisis Akuntabilitas Laporan**

Keuangan pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN)”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

1. Akuntabilitas laporan keuangan koperasi karyawan PT. PLN (PERSERO) ini merupakan salah satu pertanggungjawaban dalam pengukuran suatu laporan keuangan yang akuntabel.
2. Koperasi yang lebih guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab dapat meningkatkan kepercayaan para anggotanya terhadap para pengurus koperasi.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, agar penelitian ini dapat menjadi suatu kajian yang terukur dan terarah, dan tidak melebar, maka masalah penelitian dibatasi pada proses pelaksanaan kegiatan akuntabilitas laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN).

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah dalam penelitian ini, maka dapat dibuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akuntabilitas Laporan Keuangan pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN)?

2. Bagaimanakah bentuk laporan keuangan pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN) apakah sudah berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui akuntabilitas laporan keuangan pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN).
2. Untuk mengetahui bentuk dari laporan keuangan pada Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN) sehingga dapat mengetahui laporan keuangan yang sudah berdaya guna, berhasil guna, bersih serta bertanggung jawab.

1.6 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, memiliki beberapa manfaat serta dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

1. Bagi penulis, sebagai penerapan ilmu yang didapat selama dibangku perkuliahan dengan kenyataan dilapangan sehingga dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu yang bersangkutan.
2. Bagi Koperasi, penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai akuntabilitas laporan keuangan koperasi dan memberikan masukan, bahan pertimbangan serta perbaikan-perbaikan yang dapat dilakukan oleh pihak koperasi mengenai

akuntabilitas laporan keuangan Koperasi Karyawan PT. PLN (PERSERO) Wilayah Sumatera Utara (KOKARLIN).

3. Bagi Penelitian Selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian berikutnya khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas laporan keuangan koperasi.
4. Bagi Universitas Dharmawangsa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan dan dapat memberi masukan bagi pembaca, khususnya dalam bidang akuntabilitas laporan keuangan.

